

Received : 13-06-2020
Accepted : 13-12-2020
Published : 30-01-2021

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA–AMERIKA SERIKAT DALAM PROGRAM SUSTAINABLE ECOSYSTEMS ADVANCED PERIODE 2016-2018

Vito Niwan Pradipta¹, Afrimadona²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta

¹vitonivanpradipta@gmail.com, ²afrimadona@upnvj.ac.id

Abstract

This article discusses the role of USAID and the United States with the cooperation of Indonesia and the United States in strengthening sustainable fisheries management that has the potential in terms of the Indonesian economy and to protect marine resources must be carried out as well as possible with the threat of IUU Fishing. Inadequate management of marine protected areas adds to the long list of threats to the fisheries and marine sector. As an archipelago surrounded by the sea and has a strategic position, the abundant wealth of Indonesia's marine resources makes it a challenge where Indonesia must be able to preserve and make the best use of Indonesia's fisheries resources. Since 2016 Indonesia has been working with the United States on the Sustainable Ecosystems Advanced program as a step to support Indonesia's efforts to improve sustainable fisheries management and marine biodiversity conservation. This collaboration was realized through assistance from the US Agency for International Development (USAID). The research method used is a qualitative method with a descriptive analysis approach. The author conducted interviews and literature studies namely data collection from books, articles, journals and the internet. The final results of this paper would like to show that the collaboration carried out has an important role in supporting Indonesia to develop the maritime sector.

Keywords : *IUU Fishing, Implementation of collaboration, Sustainable Ecosystems Advanced, USAID, Maritime*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang peran USAID dan Amerika Serikat dengan adanya sebuah kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam menguatkan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang berpotensi dalam segi perekonomian Indonesia dan untuk melindungi sumber daya laut harus dilakukan sebaik mungkin dengan adanya ancaman IUU Fishing. Pengelolaan kawasan konservasi Perairan yang belum optimal menambah daftar panjang ancaman bagi sektor perikanan dan kelautan. Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut dan mempunyai

posisi strategis, kekayaan sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah menjadikan suatu tantangan dimana Indonesia harus dapat melestarikan dan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya perikanan Indonesia. Sejak tahun 2016 Indonesia bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam program Sustainable Ecosystems Advanced sebagai langkah untuk mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan pengelolaan perikanan berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati laut. Kerjasama ini diwujudkan lewat bantuan yang dilakukan oleh US Agency for International Development (USAID). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penulis melakukan wawancara dan studi kepustakaan yakni pengumpulan data dari buku, artikel, jurnal dan internet. Hasil akhir dari penulisan ini ingin menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan memiliki peran penting dalam mendukung Indonesia mengembangkan sektor maritim.

Kata Kunci : Kata kunci: IUU Fishing, Implementasi kerjasama, Sustainable Ecosystems Advanced, USAID, Maritim

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang strategis, mengingat jalur-jalur perlintasan laut internasional melintasi perairan Indonesia. Posisi Indonesia terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudera, samudera Pasifik dan samudera Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari

16.056 pulau sebagian besar berbentuk pulau-pulau besar dan kecil yang dikelilingi laut. Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut dan mempunyai posisi strategis menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang cukup menguntungkan dari segi perekonomian. karena Indonesia yang sebagian besar wilayahnya merupakan laut menjadi negara maritim yang kekayaan lautnya sangat melimpah sehingga dapat menjadi salah satu pemasukan terhadap perekonomian negara.

Sumber daya laut yang kaya di Indonesia menjadikan negara ini sebagai

penghasil ikan terbesar kedua di dunia yang menyediakan produk makanan laut untuk pasar internasional dan domestik. Di Indonesia, produk perikanan diperkirakan menyediakan 54 persen dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki tingkat ketergantungan tertinggi pada sumber daya perikanan. Kelimpahan

sumber daya laut di Indonesia berperan penting dalam perikanan dunia. Produk-produk kelautan Indonesia memenuhi permintaan pasar domestik maupun internasional. Indonesia terletak di garis khatulistiwa dan di wilayah yang dikenal sebagai Segitiga Terumbu Karang. Kawasan ini diakui sebagai pusat global keanekaragaman hayati laut, yang meliputi seluruh atau sebagian dari enam negara Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina dan Kepulauan Solomon dan Timor Leste. (USAID SEA, 2017)

Sebagian wilayah Indonesia masuk ke dalam kawasan Segitiga Terumbu Karang yang berarti pengelolaan perikanan dan ekosistem terumbu karang yang lebih baik diperlukan sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya laut dan perikanan, yang sekaligus juga memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dengan adanya sumber penghidupan yang berkelanjutan, ketahanan pangan, serta tingkat adaptasi yang baik terhadap dampak perubahan iklim. Seiring perkembangan lingkungan strategis, peran laut menjadi signifikan serta dominan dalam mengantar kemajuan perekonomian negara. (USAID SEA, 2018)

Indonesia sangat tergantung pada sumber daya laut untuk perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi, berarti harus ada upaya menanggulangi isu pengelolaan dan kelestarian harus segera dilakukan karena di perairan Indonesia, masih banyak ancaman- ancaman yang berkontribusi besar terhadap kerusakan terumbu karang. Hal tersebut menjadikan produksi ikan dan sumber daya laut di daerah tersebut mengalami penurunan stok hasil laut. Jika masih adanya aksi tersebut yang sering terjadi maka akan menghambat perkembangan ekonomi Indonesia.

Penangkapan ikan yang berlebih menjadi salah satu ancaman utama terhadap kelestarian sumber daya perikanan seperti IUU Fishing, pengambilan terumbu karang, dan minimnya data status sumber daya laut, dan lemahnya sistem registrasi kapal-kapal kecil serta minimnya sumberdaya manusia dan pendanaan dalam implementasi kegiatan perikanan dan konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi Perairan yang belum optimal menambah daftar panjang ancaman

bagi sektor perikanan dan kelautan. Pengembangan kawasan pesisir yang tidak ramah lingkungan sertapolusi akibat pengembangan perairan umum menjadi tantangan utama dalam implementasi perencanaan zonaperairan. Dengan adanya masalah-masalah tersebut menjadikan perhatian di kawasan kelautan di rasa penting agar keseimbangan ekosistem di perairan Indonesia terjaga.

Di tengah situasi tersebut sektor perikanan Indonesia mendapatkan peluang untuk berupaya meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan di Indonesia. Sebagai bagian dari Kemitraan Strategis AS-Indonesia Untuk meningkatkan industri perikanan Indonesia, Indonesia dan Amerika Serikat mempunyai program yang dinamakan Sustainable Ecosystems Advanced. Amerika Serikat dan Indonesia melakukan berbagai kerja sama di bidang maritim yang akan mendukung kepentingan kedua negara, melindungi lautan, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan melalui program Sustainable Ecosystems Advanced. Program ini membantu Indonesia untuk meningkatkan persediaan ikan yang menurun disebabkan oleh praktik ikan yang tidak kondusif, terumbu karang yang rusak dan sekarat. Kemitraan USAID SEA menciptakan kebutuhan daerah akan adanya perikanan berkelanjutan dan konservasi laut yang lebih baik. Selain membantu nelayan setempat menggunakan peralatan dan praktik menangkap ikan yang aman bagi keberadaan stok ikan dan terumbu karang, program ini juga membantu masyarakat berperan dalam perlindungan sumber daya yang diandalkannya. (Purningsih, 2018)

Proyek kerjasama yang di fokuskan di tiga provinsi yang masuk ke dalam wilayah perairan Banda. Laut Banda ini terdiri dari tiga pulau besar dan tujuh pulau kecil. Terumbu karang di Kepulauan Banda tersebar di enam pulau di kepulauan Banda, mulai dari Pulau Run di sebelah barat, sampai Pulau Hatta, serta 50 km ke arah selatannya. Lebih dari 300 spesies karang keras terdapat pada perairan tersebut, yang memiliki standar dunia yang tinggi sehingga diberikan wilayah kecil di Pulau Banda. Pada umumnya terumbu karang yang terdapat di Pulau Banda adalah terumbu karang tepi yang sempit tanpa adanya sebuah terumbu karang intertidal yang rata. Telah teridentifikasi empat jenis komunitas karang yaitu dua jenis berasal dari tempat landai yang dalam dan dua lainnya dari wilayah perairan yang agak dangkal. Perikanan adalah mata pencaharian pokok dengan aktivitas perikanan yang didukung oleh 5.635 nelayan. Potensi laut banda sebagai penghasil ikan pelagis kecil seperti ikan layang, selar, tembang, lemuru dan kembung, dan lain-lain. Kapal nelayan beroperasi dengan menggunakan mesin yang target utamanya adalah ikan tuna ekor kuning *Thunnus albacores* atau jenis pelagis lainnya. (Kementerian Kelautan Perikanan, 2019)

Kemitraan dengan USAID SEA menciptakan kebutuhan daerah akan adanya perikanan berkelanjutan dan konservasi laut yang lebih baik. USAID SEA juga bermitra dengan pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia untuk mencegah penurunan stok ikan secara drastis dan untuk mengakhiri penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur melalui perencanaan dan kebijakan kelautan yang lebih efektif. Upaya-upaya ini termasuk

bekerja dengan pemerintah nasional untuk meningkatkan sistem Indonesia dalam mengumpulkan data perikanan dan untuk menentukan tingkat tangkapan.

Kerangka Teori

a. Teori Kerjasama Internasional

Hubungan Internasional adalah sebuah disiplin ilmu yang sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dapat diamati dan mencoba mendapatkan variabel-variabel dasar untuk menerangkan perilaku serta mengungkapkan karakteristik-karakteristik atau tipe-tipe hubungan antara unit-unit sosial (Coulumbis, 1999). Menurut Axelrod dan Keohane menjelaskan bahwa kecenderungan kerjasama antara negara dilakukan pada tiga asumsi yakni:

1. *Mutuality of interest* (sama-sama berkepentingan)
2. *The shadow of the future* (bayangan tentang masa depan),
3. *Number of actors* (jumlah pemain).

Dalam *Mutuality of interest* di asumsikan *Payoff structure* akan mempengaruhi the level of cooperation artinya kebijakan negara yang saling menguntungkan cenderung akan dipilih sejumlah aktor untuk bekerjasama dibandingkan dengan menawarkan solusi yang konfliktual. Sehingga, *The Payoff structure* yang mempengaruhi *mutuality of interest* dengan demikian setiap aktor tertuju pada tujuan yang sama.

Selanjutnya, *the Shadow of the Future*. Terdapat empat faktor yang membantu membentuk *the Shadow of the Future*, yakni: (Fathun, 2016)

- a) *Long Time Horizon*, hubungan kerjasama terus berlanjut dalam kurun waktu yang tidak terhingga,
- b) *Regularity of Stakes*, interaksi yang terus menerus, bukan *a single-play*, satu kali permainan selesai. *Reliability of Information about the Others' Actions*
- c) informasi yang bisa diandalkan tentang tindakan aktor lain,
- d) *Quick feedback about changes in the others' actions*, *feedback* antara kebijakan dan hasil yang dicapai.

Kemudian *Number of Actors* dalam konteks ini dengan melihat banyaknya aktor yang bermain dalam konteks kerjasama maka tidak bisa dipungkiri dalam kerjasama pula banyak terjadi aktor yang menjadi profokator. Maka dari itu USAID memilih aktor yang mempunyai tujuan yang sama. Pada era globalisasi sekarang ini hubungan antar negara merupakan salah satu faktor penting dalam memenuhi kebutuhan negara itu sendiri. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya, dengan memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan namun tetap berpedoman dengan politik dan ekonomi dari negara-negara yang menjalin kerjasama. Kerjasama Internasional biasanya dilakukan di beberapa bidang yaitu pendidikan, pertahanan dan keamanan, ekonomi maupun lingkungan. Selain akan memberikan keuntungan terhadap masing-masing negara, kerjasama internasional juga akan mempererat hubungan diplomasi yang baik dari negara yang mengikuti atau menjalani kerjasama.

b. Konsep Kerjasama Bilateral

Dalam era globalisasi negara tentu membutuhkan negara lain dalam berbagialhal, terkait asumsi tersebut sebuah hubungan bilateral hadir. Sebuah negara tidak akanbisa mempertahankan eksistensinya dan memenuhi kebutuhan rakyatnya jika tidak berhubungan dengan dunia internasional, rasa saling membutuhkan inilah yang lahir menjadi hubungan antar negara baik dalam hal kerjasama atau hal yang bersifat saling menguntungkan lainnya. Dalam sejumlah isu yang menyertai negara, ada sebuah proses dimana pemerintah negara saling mendekati satu sama lain dengan merundingkan dan membahas masalah tersebut hingga pada proses penyelesaian yang berakhir dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang tidak merugikan kedua belah pihak. Proses ini disebut kolaborasi atau kerjasama. (Holsti, 1975)

Kerjasama bilateral bisa dikatakan sebagai sebuah perjanjian yang didalamnya melibatkan kedua negara untuk memastikan hubungan jangka panjang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kerjasama ini dilakukan oleh state to-state, yang di dalamnya terdapat aktor negara sebagai pembuat keputusan untuk menentukan hasil dari perundingan perjanjian kerjasama. Biasanya dalam kesepakatan ini ada berbagai bidang yang terkandung di dalamnya, politik, ekonomi perdagangan, kebudayaan, pendidikan, keamanan pertahanan dan bidang lainnya. Sebuah perjanjian yang dihasilkan dari kerjasama bilateral biasanya memilik peran penting dalam adanya transfer teknologi, pertukaran fasilitas yang dimiliki oleh kedua negara yang telah sepakat dalam perjanjian itu

dalam rangka mencapai tujuan dari kedua negara terkait.

c. Konsep Bantuan Luar Negeri

Menurut Lumsdaine (Lumsdaine, 1993, hal. 280) membuat hubungan langsung dengan teori idealis yang mengatakan bahwa *“the postwar period was a vindication of the Wilsonian vision”*, di mana periode pasca perang merupakan masa mempertahankan visi-visioner Wilsonian. Konsekuensinya adalah, ide-ide kemanusiaan dan karakteristik nilai dari dunia barat menjadi basis kerjasama internasional dan komitmen yang lebih tinggi terhadap perjuangan pengentasan kemiskinan. Lumsdaine menggunakan argumen perubahan dalam sistem internasional untuk membangun pandangan liberal yang mampu menjelaskan perubahan yang ada di dalam rezim bantuan luar negeri. Berfokus pada pentingnya negosiasi untuk kelangsungan kerjasama internasional dan pembangunan rezim internasional.

Dalam literatur liberal, pembahasannya semakin dekat dengan perdebatan teknis seperti tentang pembangunan dan ekonomi, hal tersebut sesuai dengan usaha yang di buat oleh kelompok internasional untuk mempermudah cara mendapatkan bantuan, meningkatkan pembiayaan bantuan luar negeri., dan menyalurkan lebih banyak bantuan lewat saluran multilateral yang menunjukkan bahwa keputusan-keputusan besar akan di ambil oleh kelompok internasional yang nantinya berimbas pada efisiensi bantuan luar negeri. Kerjasama yang melibatkan Indonesia dan Amerika Serikat terkait program kerja yang mereka lakukan menunjukkan bahwa bantuan luar negeri dapat digunakan sebagai jalan untuk mencapai tujuan perkembangan

Indonesia sendiri. Karena kerjasama yang dilakukan kedua negara terkait pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia serta pelatihan-pelatihan masyarakat setempat dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan.

d. Konsep Sustainable Development

Menurut Pearce & Tunner bahwa makna pembangunan berkelanjutan terletak pada isu tentang bagaimana seharusnya lingkungan alam diperlakukan agar berperan dalam sustainabilitas ekonomi sebagai suatu sumber daya perbaikan standar hidup. Pembangunan berkelanjutan menurut Pearce dan Tunner berarti pemanfaatan sumber daya terbarukan sebanding dengan ketersediaannya secara alami antar waktu. Perhitungan atau pertimbangan biaya dan kerusakan lingkungan juga merupakan instrumen penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Pearce & Turner, 1990, hal. 42)

Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang berkelanjutan mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan hidup yang dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi

Stockholm (UN Conference on the Human Environment) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan (Soerjani, 1987).

Masa depan kehidupan bangsa dan negara akan banyak sekali ditentukan oleh berbagai pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah implementasi dari kebijakan yang diambil.

Perlunya disiapkan suatu lingkungan agar tujuan pembangunan berkelanjutan berhasil. Dalam hal ini kebijakan ataupun program tersebut mesti mempertimbangkan baik dari sisi teknis, legal, fiskal, administrasi, politik, etik dan budaya agar mudah di implementasikan. Pembangunan berkelanjutan sangatlah perlu diterapkan dimanapun dan oleh siapapun pembangunan itu dilakukan. Melihat kondisi laut Indonesia yang saat ini membutuhkan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan langkah solutif dan antisipatif agar dapat terus mempertahankan eksistensinya baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang.

Metodologi Penelitian Kualitatif

Metodologi penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan dalam memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan dan tata cara tertentu sesuai dengan apa yang akan dikaji atau yang diteliti secara ilmiah. Metodologi digunakan untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian (Creswell, 2007). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap sebagai masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data yang biasanya dikumpulkan dalam setting peserta, analisis data secara induktif dibangun dari beberapa topik ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Laporan

tertulis terakhir memiliki struktur yang fleksibel. Mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini mendukung cara untuk melihat penelitian yang menghargai gaya induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya menghadirkan kompleksitas situasi.

Pendekatan Penelitian yang digunakan penulis adalah Kualitatif. Metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks mengenai fenomena yang sulit diungkapkan oleh penelitian kuantitatif. Desain kualitatif adalah desain yang tidak “teratur” dan prosedur tetap, tetapi lebih terbuka dan terus berkembang. Format dalam desain kualitatif lebih bebas dari pada format dalam desain kuantitatif. Idealnya desain tersebut harus menyampaikan suatu pemikiran kuat. Pendekatan kualitatif menggabungkan lebih banyak bentuk tulisan sastra, pengalaman dalam membaca banyak jurnal dan naskah kualitatif di perpustakaan penting untuk memberikan gambaran penulisan yang baik. Menurut, kecanggihan program komputer kualitatif dan pengalaman menggunakan program ini juga merupakan aset bagi mereka yang memilih pendekatan kualitatif.

Pembahasan

a. Ancaman Illegal Fishing

Melihat potensi kelautan Indonesia, khususnya sumber daya perikanan, maka wilayah laut Indonesia merupakan ladang pendapatan nasional yang berpotensi sangat besar untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat, sehingga laut bukan sekedar menjadi sarana penghubung antar pulau tapi merupakan suatu tempat penghasil devisa bagi negara, Namun, kurangnya perhatian pemerintah di sektor kelautan memberikan

peluang kepada bangsa-bangsa lain untuk mengeksploitasi kekayaan laut Indonesia, khususnya kekayaan laut hayati, termasuk melalui cara-cara ilegal. Kemudian tetapi penangkapan ikan di Indonesia belum dilakukan secara berkesinambungan. Pengelolaan laut yang selama ini mengedepankan hasil utama perikanan sudah jelas tidak mampu mempertahankan kondisi kelautan. Terlepas dari sebagai tempat penghasil devisa, peningkatan pendapatan, menyerap tenaga kerja, serta mendorong pembangunan wilayah, pembangunan kelautan melalui pemanfaatan produk perikanan menyisakan sisi yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain eksploitasi produk perikanan dan kelautan dan juga praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan asing di perairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar. Kegiatan illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (transnational crime) karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas negara. Para pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitasnya melampaui batas-batas negara. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia. Upaya Indonesia untuk mengatasi kegiatan illegal fishing yang bersifat lintas batas adalah tidak mudah dan juga tidak

cukup dilakukan oleh pemerintah Indonesia semata.

Penangkapan ikan IUU merajalela di perairan Indonesia, dan diperkirakan bahwa 25 persen ikan Indonesia dicuri melalui praktik penangkapan ikan. Penangkapan ikan IUU melibatkan kapal asing yang beroperasi tanpa izin di perairan Indonesia dan nelayan

Indonesia yang menggunakan metode penangkapan ikan yang merusak, alat tangkap ilegal, atau yang tidak terdaftar dan yang hasil tangkapannya tidak dilaporkan. Penelitian menunjukkan bahwa kapal-kapal IUU yang dioperasikan pihak asing terutama berasal dari negara-negara tetangga, termasuk Vietnam, Filipina, Thailand, dan Malaysia, dan cenderung menggunakan kapal-kapal besar. Penangkapan ikan IUU di Indonesia menunjukkan gejala penegakan hukum yang tidak memadai, baik di pelabuhan maupun di laut. Wilayah penangkapan ikan di Indonesia sangat luas dan tidak dapat dihindari bahwa pengawasan wilayah ini merupakan suatu tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa penangkapan ikan IUU menimbulkan kerugian negara sampai sekitar USD 25 juta per tahun (DFW Indonesia, 2016). Kerugian finansial yang signifikan dari pencurian ikan ini mendorong pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan upaya penanganan penangkapan ikan IUU. (USAID SEA, 2017)

Laut sebagai kekayaan sumber daya alam adalah aset publik yang harus dikelola secara adil sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua pihak. Menurut UU No.5/1983 sumber daya alam laut dibagi atas dua kelompok, yakni sumber daya alam hayati dan non-hayati. Ikan adalah sumber daya alam hayati yang paling dominan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Disamping

banyak pula ragam kekayaan alam hayati lain yang dapat dimanfaatkan untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor. Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi kelautan yang besar, seharusnya Indonesia dapat memaksimalkan potensi kelautan tersebut bagi kemajuan pembangunan ekonomi nasional.

Tabel

TAHUN	KAPAL DITANGKAP		
	KPI	KIA	JUMLAH
2005	91	24	115
2006	83	49	132
2007	95	88	183
2008	119	124	243
2009	78	125	203
2010	24	159	183
TOTAL	490	569	1059

Kapal Pelaku IUU Fishing yang Ditangkap 2005-2010

Berdasarkan data di atas terungkap bahwa aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal ikan asing di perairan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perairan di sekitar Kalimantan Barat menjadi salah satu tempat paling menarik bagi kapal ikan asing untuk melakukan kegiatan illegal fishing. Kegiatan illegal fishing banyak dilakukan di ZEEI Laut Cina Selatan dan juga di sekitar perairan Kalimantan Barat sendiri. Kapal ikan asing tersebut umumnya berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan beberapa dari RRC. Kasus pencurian ikan membawa kerugian materiil yang sangat besar bagi Kalimantan Barat. Dalam satu tahun, daerah ini diprediksi merugi hingga 5 triliun rupiah (Muhamad, 2012). penyebab

terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia, antara lain, adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan
2. Terbatasnya dana untuk operasional pengawasan
3. Terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
4. Masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama ZEE
5. Kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku illegal fishing sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap, dan sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia
6. Kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal.

Luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan dengan locus delicti illegal fishing juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya illegal fishing. Dikarenakan persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan. Dengan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan para pelaku pun kemudian menganggap sepele hal tersebut. Untuk melindungi laut indonesia, pemerintah melakukan upaya perlindungan lingkungan laut melalui konservasi laut, pengendalian

pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, dan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana. Undang undang ini terdiri dari beberapa bab. Bab kesatu mengatur tentang ketentuan umum, kedua tentang asas dan tujuan, ketiga tentang ruang lingkup, keempat tentang wilayah laut, kelima pembangunan kelautan, keenam pengelolaan kelautan, ketujuh pengembangan kelautan, kedelapan pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, kesembilan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut.

b. Kerjasama Indonesia – Amerika Serikat Dalam Program *Sustainable Ecosystems Advanced*

Indonesia merupakan sebuah negara maritim yang tentu bergantung pada hasil lautnya. Kekayaan hasil laut Indonesia menjadikan salah satu peluang untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Namun, kurangnya sumber daya manusia maupun peralatan memadai yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan minimnya pemanfaatan potensi hasil laut tersebut. The United States Agency for International Development (USAID) adalah lembaga federal yang mengelola bantuan luar negeri Amerika Serikat di seluruh dunia untuk membantu negara-negara berkembang memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial mereka. USAID adalah badan pemerintah Amerika Serikat terkemuka yang bekerja untuk mengakhiri kemiskinan global yang ekstrim dan memungkinkan masyarakat demokratis yang tangguh untuk merealisasikan potensinya. Melalui investasi yang bersasaran dan dengan memanfaatkan kekuatan sains, teknologi dan

inovasi, USAID bekerja dengan Pemerintah Indonesia, pemimpin lokal, akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil dan mitra untuk mengatasi tantangan pembangunan, dari menempa demokrasi yang adil dan akuntabel hingga memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang paling rentan. (USAID, 2018)

Proyek USAID SEA ini adalah inisiatif lima tahun yang memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan dan untuk melestarikan keanekaragaman hayati di tingkat lokal, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proyek ini merupakan proyek lima tahun (2016-2021) yang mendukung Pemerintah Indonesia dalam menguatkan tata kelola sumber daya perikanan dan kelautan, serta konservasi keanekaragaman hayati. Proyek USAID SEA memfokuskan kerjasamanya di Provinsi Maluku Utara, Maluku dan Papua Barat yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 yaitu di perairan Banda. Karena di perairan Banda terdapat lebih dari 300 spesies karang keras terdapat pada perairan tersebut, yang memiliki standar dunia yang tinggi dan untuk meminimalisir kerusakan terumbu karang dan penangkapan ikan secara berlebih dimana sumber daya yang terdapat disana terbilang cukup banyak. Melalui pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Proyek USAID SEA bertujuan untuk menguatkan pengelolaan perikanan dan kawasan perlindungan laut guna meningkatkan produktivitas perikanan, konservasi, dan pemanfaatan berkelanjutan.

Proyek yang didanai oleh USAID SEA mendukung pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan tata kelola perikanan dan sumber daya laut yang lebih baik sebagai

upaya strategis dalam melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia. Adapun tujuan dari proyek USAID SEA ini adalah untuk mendukung peningkatan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan mereformasi pengelolaan perikanan dan mempromosikan kawasan konservasi perairan dan meningkatkan produktivitas perikanan, ketahanan pangan, dan penghidupan berkelanjutan di wilayah sasaran, mendukung dan memperkuat peran kepemimpinan dan kapasitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah daerah untuk mendorong konservasi dan penangkapan ikan secara berkelanjutan. Bantuan USAID melalui Proyek SEA USAID diharapkan akan meningkatkan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati laut Indonesia melalui peningkatan kapasitas dan penerapan konservasi laut dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. (USAID, 2018)

Proyek USAID SEA di Maluku diimplementasikan oleh Tetra Tech dan konsorsium mitra yakni World Wildlife Fund-Indonesia (WWF-Indonesia), Coral Triangle Center (CTC), Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI), Indonesia Locally Managed Marine Area (ILMMA), serta Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI). Berbagai aksi pengelolaan dilakukan melalui kerangka tata pada tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten, dan masyarakat dalam upaya mengatasi banyaknya dan beragamnya tantangan pesisir dan laut yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Secara garis besar, aksi-aksi pengelolaan ini termasuk ke dalam kategori-kategori berikut ini:

1. Perencanaan tata ruang laut

2. pengelolaan pembangunan pesisir
3. penanggulangan pencemaran
4. pengelolaan ekstraksi dan rehabilitasi
5. pembentukan kawasan konservasi perairan
6. pengelolaan perikanan
7. penegakan hukum
8. perubahan perilaku sosial
9. pengembangan keterampilan yang dibutuhkan untuk keberlanjutan.

Prioritas Proyek USAID SEA di Maluku

Dalam komponen Perikanan Berkelanjutan, sejumlah kegiatan USAID SEA mencakup evaluasi sistem pencatatan kapal menggunakan logbook, sistem pelacakan, memperkuat kapasitas institusi terkait, dan memetakan peluang serta merancang strategi pengembangan matapencaharian alternatif. Untuk mengatasi minimnya data perikanan, sejumlah kegiatan yang dilakukan adalah evaluasi terkait peran institusi-institusi perikanan di tingkat provinsi maupun kabupaten dalam pengumpulan data, evaluasi metodologi, pengumpulan data, sistem diseminasi, serta pengembangan baseline status sumber daya laut. Kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan KKP mencakup survei dan identifikasi kawasan yang berpotensi dijadikan KKP, pengembangan peraturan desa dan institusi tradisional, pengembangan kapasitas penyuluh dan pendamping yang terlibat dalam perencanaan KKP dan pengelolaan perikanan, pengembangan jaringan antar institusi pengelola, penguatan implementasi Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K), serta pengelolaan praktik perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat di Maluku atau yang dikenal dengan nama “Sasi.”

Dalam aspek tata ruang laut, kegiatan difokuskan pada pengembangan, finalisasi, legalisasi serta implementasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), sosialisasi dokumen tata ruang laut tersebut, dan rangkaian pelatihan terkait tata ruang laut. Untuk aspek penegakan hukum, USAID SEA mengembangkan program komunikasi dan outreach sebagai upaya mensosialisasikan peraturan terkait kelautan dan perikanan, mengembangkan sistem insentif bagi aktivitas Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISMASWAS) serta pengembangan kapasitas dan pelatihan. (USAID, 2017)

Prioritas Proyek USAID SEA di Maluku Utara

Proyek USAID SEA di Maluku Utara berfokus pada upaya penanggulangan penangkapan ikan berlebih dan praktik perikanan merusak melalui berbagai kegiatan mencakup penelitian untuk menilai status sumber daya ikan, identifikasi tumpang tindih data, evaluasi registrasi dan sistem pengawasan kapal, serta pengembangan sistem pelacakan kapal. Proyek USAID SEA juga memperkuat metode pengumpulan dan pengelolaan data, sistem diseminasi, serta mengembangkan baseline untuk mengukur status sumber daya laut. Untuk menanggulangi minimnya pengelolaan KKP, kegiatan dilakukan melalui survei dan identifikasi KKP baru di Pulau Morotai, Guraici, Sula, Mare, Widi dan Makian.

Memberikan serangkaian pelatihan, serta memperkenalkan mata pencaharian alternatif sebagai upaya untuk mengurangi kerusakan habitat laut di lokasi Kawasan Konservasi Perairan. Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi MSP, proyek ini berfokus pada sosialisasi MSP dan mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi. Dalam aspek penegakan hukum, proyek ini menghidupkan kembali Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (POKMASWAS) hingga dapat berfungsi secara efektif di masing-masing KKP. (USAID, 2017)

Prioritas Proyek USAID SEA di Papua Barat

Proyek USAID SEA mengidentifikasi ancaman bagi kelestarian sumber daya laut dan perikanan untuk kemudian mengembangkan strategi yang mengacu pada empat pendekatan teknis utama yakni (1) Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem atau Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM), (2) Kawasan Konservasi Perairan (KKP), (3) Perencanaan Tata Ruang Laut, dan (4) penegakan hukum. Sejumlah upaya dilakukan untuk mendukung perikanan berkelanjutan dan mendorong praktik wisata bahari yang berkelanjutan, melakukan pengumpulan data perikanan dan ekosistem terumbu karang, membangun kapasitas para pemangku kepentingan daerah dalam menerapkan EAFM, serta mengembangkan Kawasan Konservasi Perairan dan memperkuat institusi pengelolanya. Pada lingkup provinsi, proyek USAID SEA juga mendukung penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) di Papua Barat. (USAID, 2017).

Kesimpulan

Untuk meningkatkan industri perikanan Indonesia, Indonesia dan Amerika Serikat mempunyai program melalui Proyek SEA mendorong perikanan lokal dan pengelolaan sumber daya kelautan di Wilayah Pengelolaan Perikanan khususnya di tiga Provinsi di Indonesia. Proyek yang mendukung Pemerintah Indonesia dalam menguatkan tata kelola sumber daya perikanan dan kelautan, serta konservasi keanekaragaman hayati. Kemitraan dengan USAID SEA menciptakan kebutuhan daerah akan adanya perikanan berkelanjutan dan konservasi laut yang lebih baik. USAID SEA juga bermitra dengan pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia untuk mencegah penurunan stok ikan secara drastis dan untuk mengakhiri penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur melalui perencanaan dan kebijakan kelautan yang lebih efektif. Upaya-upaya ini termasuk bekerja dengan pemerintah nasional untuk meningkatkan sistem Indonesia dalam mengumpulkan data perikanan dan untuk menentukan tingkat tangkapan. Dengan adanya kerjasama tersebut maka USAID SEA akan melakukan program-program kerjasama tersebut dan diharapkan mampu untuk membantu menguatkan pengelolaan perikanan Indonesia. Capaian tahun pertama proyek USAID SEA meliputi penyusunan dan analisa data-data perikanan, status sosial-ekonomi, kondisi biofisik Maluku Utara pesisir serta sumber daya lautnya. Serial data dan analisis merupakan inputan penting bagi proses perencanaan tata ruang. Kerjasama ini memperkuat peran Indonesia dalam melanjutkan pembangunan di sektor perikanan dan menjadikan negara poros maritim dunia.

Kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perikanan, ketahanan pangan serta mata pencaharian yang berkelanjutan melalui upaya konservasi habitat dan spesies penting dalam wilayah pengelolaan perairan yang menjadi target yakni Wilayah Pengelolaan Perikanan. Sumber daya perikanan Indonesia telah dikenal menyimpan potensi yang baik selama ini dan memerlukan penanganan yang baik. Pada prinsipnya adalah sumber daya kelautan Indonesia ini luar biasa untuk ketahanan pangan dunia. Karena itu Amerika Serikat ingin meyakinkan semuanya berkelanjutan dan bisa melanjutkan ketahanan pangan di Indonesia dan dunia. Program-program kerjasama perikanan Indonesia dan Amerika Serikat berdasarkan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Indonesia dan Amerika Serikat pada dasarnya telah memiliki hubungan diplomatik dalam rentang waktu yang cukup lama. Kedua negara juga terlibat dalam berbagai kerjasama multilateral, baik di dalam forum regional maupun internasional. Sedangkan secara bilateral, kerjasama komprehensif antar kedua negara sangat erat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2010 meliputi ranah politik dan kemandirian, ekonomi, sosial, Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Referensi

- Asian Development Bank. (2014). State of the Coral Triangle. Indonesia, Mandaluyong City: Asian Development Bank.
- Bencana Hutan Dalam Hubungan Internasional 2016 Andalas Jurnal Of International Relation Vol 5 No 1 105-106

Designing and Conducting Mixed Methods
Research 2007 Sage Publication

Economics Of Natural Resources and The
Environment 1990 Washington, D.C The
Johns Hopkins University Press

Kementerian Kelautan Perikanan. (2019, Juli
15). Profil Kawasan Konservasi Perairan
Nasional TWP Laut Banda. Retrieved
Februari 17, 2020, from DIREKTORAT
JENDERAL PENGELOLAAN RUANG
LAUT:

[https://kkp.go.id/djprl/artikel/11957-
profil-kawasan-konservasi-perairan-
nasional-twp-laut-banda](https://kkp.go.id/djprl/artikel/11957-profil-kawasan-konservasi-perairan-nasional-twp-laut-banda)

Moral Vision in International Politics: The
Foreign Aid Regime 1993 Princeton

Muhamad, V. (2012). Illegal Fishing Di
Perairan Indonesia: Permasalahan Dan
Upaya Penanganannya Secara Bilateral
Di Kawasan. Simela Vitor Muhamad , 69.

Pengantar Hubungan Internasional : Power
and Justice. 1999 Bandung Putra Bardin

Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis
1975. Jakarta Erlangga

Soerjani. 1987. Sumber Daya Alam dan
Kependudukan dalam Pembangunan
Lingkungan Jakarta Universitas Indonesia
Press U.S Embassy Kedutaan Besar dan
Konsulat AS di Indonesia

USAID. (2018). Gambaran Umum
Pengelolaan Sumber Daya Laut Untuk
Perikanan Skala Kecil dan Habitat Laut
Penting di Indonesia. Kondisi Laut
Indonesia , ix.

USAID 2018 Gambaran Umum Pengelolaan
Sumber Daya Laut Untuk Perikanan
Skala Kecil dan Habitat Laut Penting di
Indonesia Kondisi Laut Indonesia viii

USAID. (2017). Proyek USAID Sustainable
Ecosystems Advanced (USAID SEA):

Lokasi Kerja Maluku. Jakarta: USAID
SEA.